

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya system perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin optimalisasi kinerja layanan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Dalam pengalokasian sumber dana agar menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan adanya penganggaran. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut ada dukungan aktif dan pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah, hal ini menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatannya.

Mardiasmo (2009: 61) menyatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana publik dan

pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif serta sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai.

Selain anggaran berbasis kinerja, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik (Maryanto, 2012: 145).

Pemerintah wajib memberikan akuntabilitas pada publik terkait kinerja yang dicapai. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ini berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui basil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Keluaran utama dari ini sangat penting digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang

penting meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk dapat mengembangkan SAKIP dengan baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya komitmen kesungguhan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

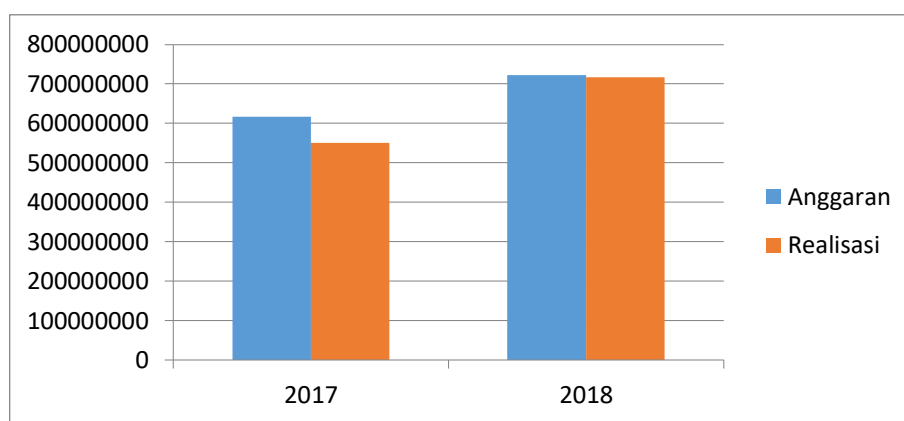
Instansi Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim, 2007:43).

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya merupakan salah satu instansi atau perangkat daerah yang membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam pengkoordinasian dan

pelaksanaan layanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tentulah mempedomani capaian tujuan dan sasaran kinerja dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Berikut target dan realisasi anggaran belanja yang dihasilkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2019

Gambar 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya
Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2017 dan 2018 masih belum tercapai sesuai target meskipun pada tahun 2018 realisasi anggaran naik sebesar 3,7% dari tahun 2017. Ini menunjukkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari laporan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Program – Program
DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	2017			2018		
		Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)	Tingkat Realisasi (%)	Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	100	94,77	94,77	100	95,78	95,78
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	91,32	91,32	100	90,29	90,29
3	Program Peningkatan KapasitasSDM	100	98,32	98,32	100	90,43	90,43
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	88,04	88,04	100	93,49	93,49
5	Program Pengembangan Data /Informasi	100	99,61	99,61	100	95,57	95,57
6	Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik	100	97,43	97,43	100	98,49	98,49
7	Program Kerjasama	100	87,43	87,43	100	95,20	95,20
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Disdukcapil	100	96,61	96,61	100	97,52	97,52
9	Program Kependudukan dan Catatan Sipil	100	85,87	85,87	100	97,52	97,52
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Program Layanan	100	93,03	93,03	100	99,61	99,61

Total	1000	932,43	93,20	1000	953,9	95,39
--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Sumber: Disdukcapil Kota Tasikmalaya (2019)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi program pada tahun 2018 pun meningkat sebesar 2,35%. Meskipun demikian, ada 3 program yang mengalami penurunan pada tahun 2015 di antaranya adalah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang turun sebesar 1,03%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur turun sebesar 7,95% dan Program Pengembangan Data/Informasi turun sebesar 4,04%. Kendati demikian, menurut Disdukcapil Kota Tasikmalaya sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sudah dapat dipertanggung jawabkan, lewat akuntabilitas laporan yang disajikan pada data tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dari:

1. Penelitian yang dilakukan Risky Rizkiana Sumarli (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Organisasi Perangkat Daerah” Sensus pada Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Organisasi Perangkat Daerah terdapat pengaruh signifikan antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi daerah.
2. Penelitian yang dilakukan Eldiani Chairunisa (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Implementasi

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, sistem pengukuran kinerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pengukuran kinerja dan implementasi anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan Venni Avionita (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung” menunjukkan hasil penelitian bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif terhadap program peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah.
4. Penelitian yang dilakukan Espinoza (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan” hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja ternyata tidak memberikan peningkatan secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, namun sudah mengarah kepada peningkatan yang positif.
5. Penelitian yang dilakukan Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Denpasar” menunjukkan hasil penelitian bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja.

6. Margaretha Henriyani (2011), mengenai Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah tepat diterapkan dalam laporan akntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Dian Nurtiani (2010), mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh anggaran berbasis kinerja terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
8. Hijrani Putri Lubis (2009), mengenai Analisis Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan analisis pemberlakuan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

9. Rinda Permata (2015), mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja SKPD Provinsi Riau, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas sumber daya berpengaruh terhadap kinerja.
10. Pratiwi Wulansari (2014), mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Bandung, hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Risky Riskiana Symarli, 2012: Dinas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja	Penulis menggunakan variabel Y yaitu Kinerja SKPD, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Kinerja	Terdapat pengaruh signifikan antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi daerah	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Vol. 12 No, 2 ISSN: 1907-9958
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Eldiani Chairunsa, 2014: Dinas	Variabel X yaitu Anggaran	Penulis menggunakan tiga	Sistem pengukuran kinerja dan	Jurnal Akuntansi Fakultas

	Daerah Kota Tasikmalaya	Berbasis Kinerja		variabel, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel X1 sistem Pengukuran Kinerja dan X2 Anggaran Berbasis Kinerja	implementasi anggaran berbasis kinerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Ekonomi Universitas Siliwangi. Vol. 13 No, 1 ISSN: 1907-9958
3.	Venni Avionita, 2013: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung	Variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja		Penulis menggunakan variabel Y yaitu Kinerja SKPD, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi pemerintah Daerah.	Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif terhadap program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah.	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Vol. 13 No, 1 ISSN: 1907-9958
4.	Espinoza, 2014: Pemerintah Kota Medan	Variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja		Penulis menggunakan variabel Y yaitu Kinerja SKPD, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Kinerja Keuangan	Dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja ternyata tidak memberikan peningkatan secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan Pemkot Medan	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Vol. 9 No. 2 ISSN: 2549 – 1261
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.	Riskawati Salawati, 2013: Dinas Pertanian	Variabel X yaitu Anggaran		Penulis menggunakan variabel Y	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh	E-Journal Fakultas Ekonomi

	Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	Berbasis Kinerja		Kinerja SKPD, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Efektivitas Pengendalian	terhadap efektivitas pengendalian	Universitas Negeri Gorontalo Volume. 10 No. 2 ISSN: 2614 – 5030
6.	Margaretha Hendriani, 2011: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	Variabel Y yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Penulis menggunakan variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah tepat diterapkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	e-Journal Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 13, No. 2 ISSN: 1412 - 9310
7.	Dian Nurtiani, 2010: Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi	Variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja		Penulis menggunakan variabel Y yaitu Kinerja SKPD, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Pengaruh anggaran berbasis kinerja terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.	e-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Vol. 9 No. 2 ISSN: 1728-2789
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
8.	Hijrani Putri Lubis, 2009: Pemerintah Daerah Kabupaten	Variabel X Anggaran Berbasis Kinerja		Penulis menggunakan variabel Y yaitu Kinerja SKPD	Secara parsial maupun secara analisis pemberlakuan anggaran	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

	Serdang			sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten.	Sumatera Utara Vol. 8 No. 1 ISSN: 2549 – 1261
9.	Rinda Permata, 2015: SKPD Provinsi Riau	Variabel X yaitu Anggaran Berbasis Kinerja	Penulis menggunakan variabel X1, X2, dan Y sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel X1, X2, X3, dan variabel Y Kinerja	Secara parsial maupun secara simultan penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas sumber daya berpengaruh terhadap kinerja SKPD Riau	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Volume. 5 No. 1 ISSN: 2623-1875	
10.	Pratiwi Wulansari (2014)	Variabel Y yaitu Kinerja SKPD	Penulis menggunakan variabel X Anggaran Berbasis Kinerja, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Sistem Pengendalian Pemerintah dan Sistem Pelaporan Keuangan	Secara parsial maupun secara simultan analisis sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	e-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Vol. 10 No. 1 ISSN: 1728- 2789	

Luqyana Khansa, 2019: Penelitian Penulis

Judul: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pelayanan Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Variabel yang digunakan: Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pelayanan

Publik sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Publik sebagai variabel dependen.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas Publik pada SKPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Pelayanan Publik pada SKPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pelayanan Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, baik secara parsial maupun simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan di atas, kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Bagi pembaca, memberikan informasi mengenai anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja pelayanan publik sebagai faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik serta bahan referensi untuk Untuk mengetahui Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Pelayanan Publik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya.
- d. Untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, dan Kinerja Pelayanan Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependuduka dan Pecatatan Sipil Kota Tasikmalaya, baik secara parsial maupun secara simultan.
- e. Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, semoga dapat dijadikan bahan untuk meresolusi perencanaan, proses, sampai evaluasi kinerja sebagai usaha dalam meningkatkan Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- f. Bagi *stakeholders* pemerintah daerah, semoga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah kaitannya dengan anggaran berbasis kinerja, dan kinerja pelayanan publik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, dengan alamat Jalan Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Kota Tasikmalaya.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 11 bulan, dimulai pada bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan jadwal penelitian terlampir (Lampiran 1).